



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TRIWULAN III

2025

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Papua II



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TRIWULAN III

2025

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Papua II

KATA PENGANTAR

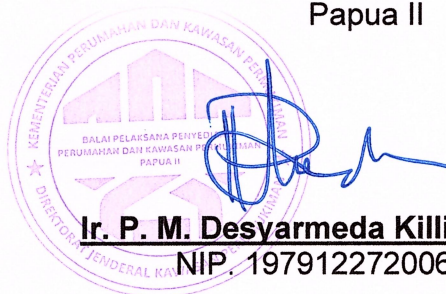
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Triwulan III (Juli-September 2025) di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menerapkan sistem kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan SAKIP.

Laporan Triwulan ini memuat uraian mengenai target pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan, capaian kinerja program dan kegiatan, permasalahan yang dihadapi beserta rencana tindak lanjut, serta kesimpulan dan saran. Diharapkan laporan ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan selanjutnya.

Dalam penyusunan dan penyajian laporan ini, kami menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dan kekurangan yang memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan laporan pada periode selanjutnya. Dengan disusunnya Laporan Triwulan III Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Tahun 2025, diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja serta akuntabilitas di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II.

Manokwari, 30 September 2025
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Papua II



Ir. P. M. Desyarmeda Killian, S.T., M.Si.
NIP. 197912272006052001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tugas dan Fungsi.....	2
I.3 Struktur Organisasi	3
BAB II CAPAIAN KINERJA.....	7
II.1 Target Kinerja Triwulan III berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja	7
II.2 Capaian Target Triwulan	7
II.3 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan.....	14
BAB III PENUTUP.....	15
III.1 Rencana Tindak Lanjut	15
III.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya.....	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Kinerja Balai P3KP Papua II	8
Tabel 2. Capaian Target Kinerja BP3KP Papua II	10
Tabel 3. Capaian Target Kinerja Satker PKP Papua Barat	12
Tabel 4. Rencana Tindak Lanjut	15
Tabel 5. Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya	17

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perumahan merupakan hak dasar setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak tersebut melalui penyediaan akses hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang penting dalam membentuk kehidupan masyarakat yang bermartabat, aman, damai, dan nyaman.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pembangunan perumahan bertujuan untuk menjamin setiap warga negara dapat menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, terencana, terintegrasi, serta berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, diperlukan penerapan prinsip pembangunan yang seimbang antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang diperkuat oleh dimensi kelembagaan. Prinsip tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Selain itu, pengarusutamaan gender menjadi strategi penting dalam memastikan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta masyarakat berpenghasilan rendah, memperoleh akses, partisipasi, dan manfaat yang setara dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam konteks tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II berkomitmen untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian kinerja Balai Pelaksana

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II pada Program Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman menunjukkan hasil yang sangat baik, ditandai dengan terpenuhinya seluruh target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berbagai kegiatan, antara lain Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan dan pemeliharaan rumah susun, penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta dukungan manajemen dan tata kelola organisasi, telah berhasil direalisasikan secara optimal. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi yang intensif, pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi secara berkelanjutan, serta komitmen terhadap prinsip transparansi, integritas, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan.

I.2 Tugas dan Fungsi

I.2.1 Tugas Balai P3KP Papua II

Balai P3KP Papua II memiliki tugas dan fungsi yang mengacu pada Permen PKP No. 1 Tahun 2025, dimana Balai P3KP Papua II termasuk kedalam Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas II yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pascabencana dan pascakerusuhan sosial, serta fasilitasi serah terima aset.

I.2.2 Fungsi Balai P3KP Papua II

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan.
2. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
8. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
11. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
12. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
13. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
14. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
15. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

I.3 Struktur Organisasi

I.3.1 Subbagian Umum dan Tata Usaha

Subbagian Umum dan Tata Usaha memiliki tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan dan administrasi Balai. Ruang lingkup tugas tersebut mencakup penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, serta administrasi sumber daya manusia. Selain itu, Subbagian ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan serta koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penerapan manajemen risiko, pelaksanaan kegiatan komunikasi publik, serta penyediaan layanan hukum bagi Balai.

I.3.2 Seksi Pelaksanaan Wilayah I

Seksi Pelaksanaan Wilayah I memiliki tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan

permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta melakukan koordinasi dan penataan kawasan permukiman pascabencana maupun pascakerusuhan sosial. Selain itu, Seksi Pelaksanaan Wilayah I juga bertugas melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta fasilitasi penghuniannya. Seksi ini turut melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta melakukan verifikasi data pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

I.3.3 Seksi Pelaksanaan Wilayah II

Seksi Pelaksanaan Wilayah II memiliki tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, serta melakukan koordinasi penyediaan lahan untuk kegiatan pembangunan perumahan. Selain itu, Seksi ini juga bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta fasilitasi penghuniannya. Seksi Pelaksanaan Wilayah II turut melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan, sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

I.3.4 Kepala Satuan Kerja

Satuan Kerja PKP Provinsi Papua Barat dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja PKP Provinsi Papua Barat dan memiliki wilayah kerja yang meliputi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Kepala Satuan Kerja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Memimpin pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.
2. Memberikan arahan dan petunjuk kepada pejabat inti di lingkungan satuan kerja guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan serta pencapaian keluaran (output) yang telah ditetapkan.

3. Menyusun program dan anggaran pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
4. Menyusun rencana teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
5. Melaksanakan kegiatan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

I.3.5 Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan tugas dan fungsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah serta pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Balai P3KP Papua II, terdapat 4 (empat) PPK, yaitu:

1. PPK Balai;
2. PPK Perencanaan dan Pengendalian;
3. PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus; dan
4. PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman.

Keempat PPK tersebut memiliki wilayah kerja yang meliputi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
2. Menyusun, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa.
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perjanjian/kontrak.
4. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan serta rencana penarikan dana berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
5. Melaksanakan penyerahan aset hasil pengadaan barang/jasa serta aset lainnya melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

I.3.6 Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar

BP3KP Papua II memiliki 2 (dua) orang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang masing-masing berkedudukan pada Balai P3KP Papua II dan Satuan Kerja PKP Provinsi Papua Barat. PPSPM merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran serta menerbitkan perintah pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, PPSPM mempunyai fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian atas kebenaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapan dokumen pendukungnya.
2. Menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengujian dan penerbitan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
4. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan penerbitan perintah pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

I.3.7 Bendahara

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II memiliki 2 (dua) orang Bendahara yang masing-masing berkedudukan pada Balai P3KP Papua II dan Satuan Kerja PKP Provinsi Papua Barat. Bendahara melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang dan/atau surat berharga yang berada dalam pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bendahara mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan dan pembukuan atas uang dan/atau surat berharga.
2. Melaksanakan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
3. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran hak tagih pihak yang berhak menerima pembayaran.
4. Melakukan pemeriksaan kesesuaian pencapaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang ditetapkan.

BAB II

CAPAIAN KINERJA

II.1 Target Kinerja Triwulan III berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja

Target Kinerja Triwulan III disusun berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja BP3KP Papua II. Dokumen Rencana Aksi Kinerja tersebut ditetapkan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun Anggaran 2025 antara Kepala BP3KP Papua II dan masing-masing Direktur Jenderal, yang bersumber dari lima Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu DIPA Sekretariat Jenderal, DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Adapun Target Kinerja Triwulan III pada BP3KP Papua II dapat dilihat pada Tabel 1.

II.2 Capaian Target Triwulan

Capaian Kinerja Triwulan III (Juli–September 2025) Balai P3KP Papua II dan Satuan Kerja PKP Papua Barat Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Rencana Aksi Kinerja, menunjukkan bahwa realisasi keuangan **Balai P3KP Papua II** mencapai **21,17%** dari target rencana sebesar 45%, sedangkan realisasi fisik mencapai 1,12% dari target rencana sebesar 45%. Sementara itu, realisasi keuangan **Satuan Kerja PKP Papua Barat** tercapai sebesar **44,50%** dari target rencana 45%, dengan realisasi fisik sebesar 61,92% dari target rencana 45%. Secara umum, capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Adapun hingga Triwulan III Tahun 2025, progres fisik kegiatan yang telah berjalan pada Balai P3KP Papua II dan Satuan Kerja PKP Papua Barat baru mencakup kegiatan Pembangunan Rumah Susun DOB Papua Barat Daya. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang masih menunggu penerbitan Surat Keputusan Calon Penerima Bantuan (SK CPB), serta kegiatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang baru memasuki tahap penandatanganan kontrak pada tanggal 24 September 2025. Rincian capaian realisasi keuangan dan fisik Balai P3KP Papua II dan Satuan Kerja PKP Papua Barat pada Triwulan III selanjutnya disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 1. Target Kinerja Balai P3KP Papua II

INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	AKTIVITAS	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)							
				TW I		TW II		TW III		TW IV	
				KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS
SEKRETARIAT JENDERAL											
SK-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal										
1	Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan	Melaksanakan layanan perkantoran	-	-	-	-	45	45	100	100
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN											
SK-1	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni										
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan	Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi	-	-	-	-	45	45	100	100
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	Menyusun laporan penyelenggaraan Klinik PKP	-	-	-	-	45	45	100	100
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman										
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2 Laporan	Menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi	-	-	-	-	45	45	100	100
2	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	500 Unit	Menyelesaikan Program BSPS	-	-	-	-	45	45	100	100
SK-3	Meningkatnya Perencanaan, Fasilitasi Penyiapan Lahan dan Pemenuhan Rumah Yang Terlayani PSU Kawasan Permukiman										
1	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	68 Unit	Menyelesaikan Pembangunan PSU di Perumahan Fajar Sowi Damai	-	-	-	-	45	45	100	100
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN											
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan										
1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	-	-	-	-	45	45	100	100

INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	AKTIVITAS	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)							
				TW I		TW II		TW III		TW IV	
				KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	Menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi	-	-	-	-	45	45	100	100
SK-2 Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perdesaan											
1	Jumlah Unit Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perdesaan	132 Unit	Menyelesaikan Pembangunan Rusun (MYC 2024-2025)					45	45	100	100
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN											
SK-1 Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan											
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	Menyusun laporan kebijakan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan	-	-	-	-	45	45	100	100
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan	Menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi	-	-	-	-	45	45	100	100
SK-2 Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan											
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	Menyusun laporan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	-	-	-	-	45	45	100	100
SK-3 Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan											
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Laporan	Menyusun laporan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	-	-	-	-	45	45	100	100
2	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Perkotaan	40 Unit	Menyelesaikan Program BSPS	-	-	-	-	45	45	100	100
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO											
SK-1 Meningkatnya Dukungan Kebijakan Keterbukaan Publik Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efektif dan Akuntabel											
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Laporan	Menyusun laporan keterbukaan informasi publik,	-	-	-	-	45	45	100	100

INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	AKTIVITAS	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)							
				TW I		TW II		TW III		TW IV	
				KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS
			transparansi, dan akuntabilitas kinerja								
SK-2	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Laporan	Menyusun laporan manajemen risiko serta pencegahan korupsi	-	-	-	-	45	45	100	100

Tabel 2. Capaian Target Kinerja BP3KP Papua II

Program/Kegiatan/KRO/RO		Vol	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi	Keuangan (Rp.)		Fisik (%)	
						RN	RL	RN	RL
SEKRETARIAT JENDERAL									
SK-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal								
1	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan	981.469.000	236.763.942	45,00	24,12	45,00	0
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN									
SK-1	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni								
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1	Laporan	287.620.000	98.247.703	45,00	34,16	45,00	0
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Laporan	50.000.000	4.957.500	45,00	9,92	45,00	0
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman								
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1	Laporan	365.141.000	86.357.303	45,00	23,65	45,00	0

Program/Kegiatan/KRO/RO		Vol	Satuan	Pagu (Rp.)	Realisasi	Keuangan (Rp.)		Fisik (%)	
						RN	RL	RN	RL
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN									
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan								
1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Kegiatan	426.890.000	142.460.943	45,00	33,37	45,00	0
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN									
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Laporan	536.646.000	131.261.163	45,00	24,46	45,00	0
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Laporan	310.911.000	42.995.509	45,00	13,83	45,00	0
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1	Laporan	271.235.000	29.658.620	45,00	10,93	45,00	0
SK-3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1	Laporan	312.470.000	29.693.929	45,00	9,50	45,00	0
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO									
SK-1	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Keterbukaan Publik Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efektif dan Akuntabel								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1	Laporan	129.233.000	11.639.000	45,00	9,01	45,00	10,77
SK-2	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1	Laporan	174.233.000	0	45,00	0	45,00	1,57
Total				3.845.848.000	814.035.612	45,00	21,17	45,00	1,12

Tabel 3. Capaian Target Kinerja Satker PKP Papua Barat

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
						RN	RL	RN	RL
SEKRETARIAT JENDERAL									
SK-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal								
1	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan	536.481.000	229.674.448	45,00	42,81	45,00	0,00
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN									
SK-1	Meningkatnya Perencanaan, Fasilitas Penyiapan Lahan dan Pemenuhan Rumah yang terlayani PSU Kawasan Permukiman								
1	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	68	Unit	792.320.000	0	45,00	0,00	45,00	0.00
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman								
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1	Laporan	172.394.000	54.043.480	45,00	31,35	45,00	0,00
2	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	500	Unit	17.766.509.000	249.230.254	45,00	1,40	45,00	0,00
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN									
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan.								
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Laporan	203.299.000	44.190.000	45,00	21,74	45,00	80,86
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perdesaan								
1	Jumlah Unit Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perdesaan	132	Unit	69.672.626.000	39.728.930.205	45,00	57,02	45,00	80,86
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN									
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan								

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
						RN	RL	RN	RL
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Laporan	839.337.000	38.216.118	45,00	4,55	45,00	0,00
SK-2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan								
1	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Perkotaan	40	Unit	1.269.272.000	0	45,00	0,00	45,00	0,00
TOTAL				91.252.238.000	40.604.841.432	45,00	44,50	45,00	61,92

II.3 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan

Berdasarkan Tabel 2 di atas, diketahui bahwa capaian target kinerja yang mengacu pada Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, dalam proses pencapaian target tersebut masih terdapat beberapa permasalahan, khususnya pada pelaksanaan paket pekerjaan fisik, dengan uraian sebagai berikut:

II.3.1 PPK Balai

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II, yang berpotensi memengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja.

II.3.2 PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus

Intensitas curah hujan yang tinggi dan terjadi hampir setiap hari mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan kawasan, seperti pekerjaan *rigid pavement*, *paving block*, kanstin, serta penanaman tanaman, tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

II.3.2 PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman

a. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

1. Terdapat 1 (satu) Penerima Bantuan (PB) dengan status tanah bersengketa sehingga mengundurkan diri di Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak.
2. Lokasi kegiatan yang berada di pulau-pulau kecil menghambat pelaksanaan kegiatan sosialisasi.
3. Terdapat pergantian Calon Penerima Bantuan (CPB) sebanyak 1 (satu) orang.

b. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman

BAB III PENUTUP

III.1 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan penjabaran permasalahan yang terjadi dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II, selanjutnya disusun rencana tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 4. Rencana Tindak Lanjut

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
PPK BALAI		
1	Keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II, yang berpotensi memengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja.	Mengajukan permohonan penambahan pegawai pada Balai P3KP Papua II sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja yang ada.
PPK PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN		
PPK RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS		
1	Intensitas hujan yang tinggi hampir setiap hari mengakibatkan pekerjaan Kawasan seperti pekerjaan rigid, paving block, Kanstin dan tanaman menjadi tidak maksimal.	Menambah dan memaksimalkan produktifitas pekerjaan pada saat cuaca cerah
PPK RUMAH SWADAYA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN		
BSPS		
1	Terdapat 1 PB tanah bersengketa dan mundur di Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak	Surat usulan perubahan dan pergantian telah disampaikan ke Pusat, menunggu Instruksi Verifikasi
2	Terdapat penurunan nilai upah tukang pada wilayah Daratan/Perkotaan dari SEMULA senilai Rp. 5.000.000-, MENJADI senilai Rp, 3.500.000-. Hal ini berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan program BSPS, mengingat volume pekerjaan bertambah sementara upah tukanganya justru menurun.	Melakukan proses komunikasi dan koordinasi kepada para pihak khususnya pemerintah kampung untuk dapat membantu upah tukang.
3	Lokasi yang berada di pulau-pulau kecil menghambat pelaksanaan sosialisasi, Terdapat pergantian CPB sebanyak 1 orang.	Mengajukan pergeseran anggaran untuk wasdal, Penggantian CPB dan penyusunan Surat Penetapan CPB Tahap III.

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
4	Fasilitator berdasarkan juknis diperkenankan operasionalnya/transportasi disesuaikan dengan kategori wilayah namun anggaran sudah terbatas/dikunci. Menimbulkan kecemburuan di kalangan Fasilitator yang ditugaskan di wilayah kepulauan dan perkotaan.	Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pemerintah daerah, melalui usulan tambahan operasional bagi fasilitator di wilayah kepulauan.
PSU		
1	Intensitas hujan mengakibatkan pekerjaan tidak maksimal.	Menambah dan memaksimalkan produktifitas pekerjaan pada saat cuaca cerah.

III.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya

Tabel 5. Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya

Triwulan Sebelumnya (TW III)				Triwulan III		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
PPK BALAI						
					Keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II, yang berpotensi memengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja.	Mengajukan permohonan penambahan pegawai pada Balai P3KP Papua II sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja yang ada.
PPK PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN						

Triwulan Sebelumnya (TW III)				Triwulan III		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
PPK RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS						
				1	Intensitas hujan yang tinggi hampir setiap hari mengakibatkan pekerjaan Kawasan seperti pekerjaan rigid, paving block, Kanstin dan tanaman menjadi tidak maksimal.	Menambah dan memaksimalkan produktifitas pekerjaan pada saat cuaca cerah
PPK RUMAH SWADAYA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN						
BSPS						
				1	Terdapat penurunan nilai upah tukang pada wilayah Daratan/ Perkotaan dari SEMULA senilai Rp. 5.000.000-, MENJADI senilai Rp, 3.500.000-. Hal ini berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan program BSPS, mengingat volume pekerjaan bertambah sementara upah tukanganya justru menurun.	Melakukan proses komunikasi dan koordinasi kepada para pihak khususnya pemerintah kampung untuk dapat membantu upah tukang.

Triwulan Sebelumnya (TW III)				Triwulan III		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
				2	Fasilitator berdasarkan juknis diperkenankan operasionalnya/ transportasi disesuaikan dengan kategori wilayah namun anggaran sudah terbatas/dikunci. Menimbulkan kecemburuan di kalangan fasilitator yang ditugaskan di wilayah kepulauan dan perkotaan.	Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pemerintah daerah, melalui usulan tambahan operasional bagi fasilitator di wilayah kepulauan.
PSU						
1.				1	Intensitas hujan mengakibatkan pekerjaan tidak maksimal.	Menambah dan memaksimalkan produktifitas pekerjaan pada saat cuaca cerah.



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA II